



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

### PENGUMUMAN NOMOR 3 TAHUN 2019

#### PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama **Kepala Biro SDM dan Umum** (Eselon II.a) di Lingkungan Ombudsman RI, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Jabatan yang akan diisi**

- Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (Eselon II.a)

**B. Persyaratan Administrasi**

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b)
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun
4. Sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 1 April 2020;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2017 dan tahun 2018;
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2017 dan Tahun 2018;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan

### C. Lamaran dan Kelengkapan Dokumen

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran yang ditandatangani pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email;
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana, serta hukuman disiplin tingkat sedang, atau tingkat berat yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik dan bermeterai Rp. 6.000,-;
6. Pakta Integritas yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-;
7. Fotokopi Ijazah S-1 (S-2 dan/atau S-3 jika ada);
8. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir min. Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Jabatan Terakhir;
10. Fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2017 dan Tahun 2018;
12. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
  - a. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
  - b. Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis; dan
  - c. Surat Keterangan Bebas Narkoba.
13. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
14. Fotokopi NPWP;
15. Fotokopi bukti penyerahan SPT Tahun 2017 dan Tahun 2018;
16. Fotokopi laporan penyerahan LHKASN/LHKPN;
17. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

### D. Pendaftaran

Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 7 November s.d 29 November 2019 pada laman Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).

1. Pelamar mengirimkan lamaran beserta dokumen kelengkapannya mulai tanggal 7 November 2019 Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 November 2019 pukul 16.00 WIB yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat :

**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920**  
**email : [panseljpt@ombudsman.go.id](mailto:panseljpt@ombudsman.go.id) Telp : 021-52960907**

Softcopy lamaran dan dokumen kelengkapan dikirimkan melalui email [panseljpt@ombudsman.go.id](mailto:panseljpt@ombudsman.go.id)

2. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
3. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan langsung kepada peserta yang lulus tahapan seleksi dan/atau melalui *website* Ombudsman

#### E. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman pendaftaran	7 November 2019
2.	Penerimaan lamaran	7 – 29 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	3 Desember 2019
4.	Ujian Makalah	9 Desember 2019
5.	Pengumuman hasil ujian makalah	10 Desember 2019
6.	<i>Assessment</i>	22 - 23 Januari 2020 (tentative)
7.	Presentasi dan wawancara akhir	7 Februari 2020
8.	Pengumuman hasil akhir seleksi	20 Februari 2020

#### F. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
  - a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
  - b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
2. Seleksi Pembuatan Makalah.
  - a. Pembuatan makalah dan paparan dilaksanakan di Gedung Ombudsman RI;
  - b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di website Ombudsman.
3. *Assessment Center*.
  - a. Penilaian menggunakan metode *Assessment Center* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Selanjutnya panitia menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi Asesmen, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Seleksi Wawancara dan Presentasi.
  - a. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan presentasi terhadap peserta yang lulus seleksi pembuatan makalah, dan dapat mengundang *user* sesuai jabatan;
  - b. Selanjutnya ketua panel menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dengan tahapan seleksi dan/atau melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).

#### G. Deskripsi Tugas Jabatan

##### 1. Kepala Biro SDM dan Umum

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan layanan pengadaan.
- c. Pengelolaan barang milik negara dan aset.
- d. Pengelolaan tata usaha dan keprotokolan.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia dan layanan umum.
- f. Pelaksanaan administrasi Biro.

#### H. Ketentuan Lain-lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.

#### Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui website Ombudsman RI [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id), untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses website dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 7 November 2019

./ Ketua Panitia Seleksi, 

Alvin Lie Ling Piao, M.Si